

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (L-KIP) Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

L-KIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap kinerja Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tahun 2021 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah berhasil tercapai maupun yang belum dapat dicapai. Penyusunan L-KIP ini telah didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam LAKIP ini telah diuraikan mengenai perencanaan kinerja Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan analisis capaiannya selama tahun 2021 beserta strategi yang digunakan oleh Biro Umum dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Secara umum target kinerja Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur telah berhasil dicapai dengan baik. Meskipun demikian kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa realisasi program/kegiatan belum dicapai selama tahun 2021. Hal ini akan menjadi bahan guna merumuskan perencanaan, kebijakan, dan langkah-langkah perbaikan untuk tahun berikutnya.

Kami berharap agar L-KIP Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021 ini dapat bermanfaat sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai di lingkungan Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Kupang, Januari 2020
KEPALA BIRO UMUM,



GEORGE MELKIANUS HADJOH, SH
PEMBINA

NIP. NIP. 19650528 198603 1 014

IKHTISAR EKSEKUTIF

Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan unit kerja yang mendukung program pimpinan daerah dalam memberikan pelayanan yang prima kepada pimpinan dan juga masyarakat. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2023, memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai, juga didukung dengan rencana alokasi anggaran untuk Tahun 2019-2023. Renstra Tahun 2019-2023 menjadi acuan atau pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan setiap Tahunnya. Dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan melalui pelayanan prima, maka Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai unsur staf dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pimpinan menjalankan Misi ke- 5 yaitu **“Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”**.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Biro Umum Setda Provinsi NTT yang membantu Gubernur dalam pemerintahan daerah di bidang ketatausahaan dan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta tata usaha keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, guna menunjang hal tersebut Biro Umum Setda Provinsi NTT untuk tahun anggaran 2021 melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemda dengan indikator kinerja meningkatnya pelayanan terhadap Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 111.617.829.255,- dan realisasi sebesar Rp. 102.309.636.358,- atau 91,66% sedangkan untuk capaian indikator kinerja sasaran kegiatan sebesar adalah 100%.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting dan dilaksanakan, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas dan menjamin kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien serta tepat sasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP) didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang mewajibkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2019-2023, Rencana Kinerja Tahun 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun 2021.

Dalam rangka menjamin kegiatan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien dan tepat sasaran, Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur harus mampu menghadirkan proses perencanaan pembangunan yang inklusif, transparan dan akuntabel. Hal mendasar yang ingin dicapai pada intinya adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Biro Umum mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan Kebijakan Pemerintah di Bidang Umum yang meliputi Bagian Rumah Tangga, Tata Usaha serta Tata Usaha Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Umum menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Pembinaan dan Petunjuk Teknis Penataan dan Pengendalian Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Perlengkapan;
2. Pembinaan dan Pengendalian Tata Usaha Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Pelaksanaan Tugas-Tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai Tugas dan Fungsinya.

Biro Umum terbagi dalam 3 (Tiga) bagian yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta personil yang tersebar di semua bagian sebanyak 111 orang dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bagian Rumah Tangga : 44 orang
- b. Bagian Tata Usaha : 38 orang
- c. Bagian Tata Usaha Keuangan Setda : 29 orang

Tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.1
Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil
Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur
Keadaan 31 Desember 2021

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	3
2	S1	35
3	D-III	5
4	SLTA/SMK/KPAA	65
5	SLTP	-
6	SD	3
JUMLAH		111

Tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil dilihat dari data pada tabel di atas terdapat 65 orang yang berpendidikan SLTA atau 58,55% dari total pegawai pada Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Biro Umum terus berupaya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memberika kesempatan kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu sarjana (S1 dan S2) di perguruan tinggi di Kota Kupang.

Table 1.2
Pegawai Biro Umum Berdasarkan Kepangkatan
Keadaan 31 Desember 2021

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	
2	Pembina Muda Tingkat I (IV/b)	1
3	Pembina (IV/a)	2
4	Penata Tingkat I (III/d)	9
5	Penata (III/c)	9
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	19
7	Penata Muda (III/a)	23
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	17
9	Pengatur (II/c)	16
10	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	9
11	Pengatur Muda (II/a)	3
12	Juru Tingkat I (I/d)	3
13	Juru (I/c)	-
14	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-
15	Juru Muda (I/a)	-
	JUMLAH	111

Table 1.3
Jumlah Pejabat Eselon Pada Biro Umum
Keadaan 31 Desember 2021

NO	JABATAN STRUKTURAL MENURUT ESELON	JUMLAH ORANG	KETERANGAN	
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	ESELON II	1	1	-
2	ESELON III	3	2	1
3	ESELON IV	9	6	3
4	Fungsional Arsiparis	4	3	1
	JUMLAH	17	12	5

Jabatan Struktural yang ada pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari :

1. Kepala Biro
2. Kepala Bagian 3 (tiga) yakni:
 - a. Kepala Bagian Rumah Tangga;
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha;
 - c. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Setda Prov. NTT.
3. Kepala Sub Bagian 9;
4. Fungsional Arsiparis 4;
5. Staf Pelaksana (PNS) 94;

B. MAKSUD

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Biro Umum mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2021, sekaligus sebagai bahan informasi bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk merumuskan berbagai Strategi, Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah dan sebagai bahan evaluasi bagi Biro Umum dalam memperbaiki kinerja di Tahun-Tahun yang akan datang.

C. SISTIMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 4 (empat) bab utama dan beberapa lampiran sebagai pendukung laporan dimaksud. Sistematika penyajian L-KIP Biro Umum adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan mencakup penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Biro Umum.

Bab II Perencanaan Kinerja mencakup ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Bab III Akuntabilitas Kinerja mencakup capaian kinerja Biro Umum dalam setiap pernyataan Kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Biro Umum. Bab ini juga menyajikan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021, perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, Analisis kinerja tahun 2020 serta solusi yang dilakukan, analisis penggunaan sumber daya, analisis program penunjang keberhasilan dan realisasi anggaran.

Bab IV Penutup yang memaparkan kesimpulan secara umum tentang capaian kinerja Biro Umum serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Biro Umum untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 memuat lampiran-lampiran data pendukung antara lain: Struktur Organisasi, Laporan Realisasi Keuangan Tahun 2021, Penetapan Kinerja Tahun 2021, Pengukuran Kinerja Tahun 2021 dan Daftar Nominatif PNS Biro Umum Tahun 2021.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

1. VISI

Berdasarkan rumusan dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019-2023 periode IV RPJPD 2005-2025, yang mengusung visi :

“NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.

RPJMD 2019-2023 juga menggambarkan cita-cita yang ingin dicapai pada kurun waktu lima tahun yang akan datang sesuai visi Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu : **“NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.**

Makna NTT Bangkit:

Bagi bangsa Indonesia, istilah atau kata BANGKIT mengandung makna filosofis dan historis yang mendalam dan membekas. Ketika bangsa Indonesia berjuang melawan penindasan dan penjajahan Belanda, para pendahulu kita sepakat untuk bersatu dan ‘bangkit’ melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan bagi Indonesia.

BANGKIT adalah suatu tindakan aktif untuk bergegas dari situasi yang ada menuju situasi baru yang lebih baik, sekaligus sebuah ajakan kolektif yang diharapkan akan menggugah semangat seluruh komponen masyarakat NTT untuk memanfaatkan semua potensi yang dimiliki dengan semangat restorasi serta bekerja keras mengejar ketertinggalan NTT dalam berbagai dimensi pembangunan. BANGKIT melambangkan suatu tekad yang bulat untuk keluar dari suatu masa keterpurukan, masa dimana tidak melakukan sesuatu yang berarti serta masa ‘tidur panjang’ untuk berjuang melawan berbagai masalah dan ketertinggalan yakni kemiskinan, ketertinggalan dalam kualitas pendidikan, ketertinggalan dalam jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dasar,

ketertinggalan dalam pengadaan berbagai infrastruktur dasar serta ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi produksi dan informasi.

SEJAHTERA merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dan pelayanan dasar yang inklusif seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non-fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, akses terhadap informasi, hubungan antar rakyat NTT yang beragam dan dinamis serta saling menghargai dan gotong royong. Untuk itu, rancangan pembangunan NTT ke depan bersifat inklusif, partisipatif dan bermanfaat bagi semua komponen masyarakat. Situasi *SEJAHTERA* tidak lain adalah pengamalan dan pengejawantahan dari sila ke-5 Pancasila yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yaitu Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembangunan yang dilandaskan pada prinsip mengupayakan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Setelah Indonesia merdeka selama 73 tahun, NTT masih merupakan salah satu Provinsi termiskin di Indonesia. Hampir separuh penduduk pedesaan tidak mendapat layanan air bersih, pemukiman penduduk tidak memiliki listrik, dan rumah penduduk masuk kategori tidak layak huni. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT masih jauh di bawah rata-rata nasional.

2. MISI

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka tujuan pembangunan yang tertuang dalam visi, dijabarkan secara lebih konkret ke dalam lima misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT 2019-2023 sebagai berikut:

a) Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil

Misi pertama ini sekaligus merupakan kerangka acuan bagi empat misi lainnya yaitu melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip *inclusive* yakni melibatkan semua *stakeholders* dan dengan pendekatan berkelanjutan yang merujuk kepada empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek kelembagaan.

b) Misi 2: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*)

NTT memiliki berbagai sumber daya yang melimpah untuk mendukung dan membangun sektor pariwisata. Karena itu, misi ini diarahkan pada upaya optimalisasi pemanfaatannya dalam rangka pengembangan sektor Pariwisata dengan pendekatan kewilayahan melalui *Tourism Estate* sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi NTT. Letak geografisnya yang strategis memungkinkan NTT menjadi salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional.

c) Misi 3: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas sosial ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir.

d) Misi 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang.

e) Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, jujur, transparan dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efisien. Birokrasi dan aparat diharapkan (dituntut) bekerja dengan lebih profesional dan berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat bagi pembangunan dan masyarakat NTT.

Mengacu pada visi dan misi tersebut, Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai unsur staf dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pimpinan menjalankan Misi ke- 5 yaitu **"Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Misi yang terkait langsung dengan Biro Umum Setda Provinsi NTT)"**

Makna yang terkandung dari Misi di atas, adalah :

Menjadi penunjang dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan mengandung arti bahwa Biro Umum adalah unsur staf yang memberikan dukungan pelayanan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan mengutamakan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang bertumpu pada keselarasan, keserasian, dan keseimbangan hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam upaya mencapai Misi tersebut di atas maka Biro Umum menjalankan tugas dan fungsinya yaitu; ***Koordinasi, Pembinaan, Pengendalian dan Pelaksanaan Tugas Pelayanan Umum*** melalui :

1. Pembinaan dan petunjuk teknis penataan dan pengendalian Rumah Tangga;
2. Pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan dan pengendalian Ketatausahaan;
3. Pembinaan dan pengendalian Tata Usaha Keuangan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. TUJUAN DAN SASARAN

- **Tujuan**

Tujuan dari misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar dan wajib non pelayanan dasar maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud Berdasarkan visi dan misi yang telah dijelaskan di atas, tujuan dari pada Biro Umum Setda Provinsi NTT yaitu mewujudkan Pelayanan Prima bagi Pimpinan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

- **Sasaran**

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut di atas, sasaran indikator yang ingin dicapai oleh Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu meningkatnya pelayanan terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekertaris Daerah.

B. RENCANA KERJA TAHUNAN BIRO UMUM (RKT) 2021

Program dan kegiatan sangat penting artinya sebagai strategi yang menentukan bagaimana cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Tahun 2021 menetapkan langkah-langkah konkrit sebagai sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tabel Rencana Kerja Tahunan 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET/OUTPUT		OUTCOME	BENEFIT	IMPACT
			REALISASI 2020	TARGET 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terwujudnya pelayanan yang professional terhadap Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekertaris Daerah	Meningkatnya pelayanan terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekertaris Daerah	NA	100 % (180 Kegiatan)	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.	Menciptakan Birokrasi yang professional dengan karakteristik, adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

C. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menjadikan penetapan kinerja Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai perjanjian kinerja Kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagaimana terlihat dalam lampiran penetapan kinerja Biro Umum Tahun 2021.

Penetapan Kinerja Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 dijadikan acuan untuk mengukur Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 2.2**Tabel Penetapan Kinerja Biro Umum Tahun 2021**

No	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan	Target	Target Kinerja (Rp.)
1.	Terwujudnya pelayanan yang professional terhadap Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekertaris Daerah	Meningkatnya pelayanan terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekertaris Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100% (180 Kegiatan)	111.617.829.255

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

1. Metode Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas (*lampiran pengukuran kinerja*). Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

2. Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- $X \geq 85 \%$: Sangat Berhasil
- $70 \% \leq X < 85 \%$: Berhasil
- $55 \% < X < 70 \%$: Cukup Berhasil
- $X \leq 55 \%$: Belum Berhasil

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (L-KIP).

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi dengan capaian kinerja Tahun sebelumnya. Acuan untuk menilai kinerja Biro Umum Setda Provinsi NTT adalah RENSTRA Biro Umum Setda Provinsi NTT Tahun (2019-2023), RKT 2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2021, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU)/Key Performance Indikator merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas yang bersifat strategis.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Program Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Program/ Kegiatan	Target	Target Kinerja (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Terwujudnya pelayanan yang professional terhadap Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekertaris Daerah	Meningkatnya pelayanan terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekertaris Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100% (180 Kegiatan)	111.617.829.255	102.309.636.358	91,66

2. Perbandingan realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Beberapa Tahun Terakhir

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai tindaklanjut dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023 Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menuntut perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dengan berdasarkan pada perubahan Renstra Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sebelumnya mengurus urusan rutin dan urusan wajib Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah diubah menjadi urusan rutinitas dengan satu program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 dengan Tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dan table 3.3 Capaian Indikator Meningkatnya Pelayanan Terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah di bawah ini :

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2019	Tahun Dasar 2020
1.	Jumlah Koordinasi FORKOMPIMDA Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	kali	341,7	100
2.	Jumlah fasilitasi kerjasama pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah lainnya	kali	217	129,1
3.	Jumlah Peningkatan Komunikasi Tokoh masyarakat, pimpinan organisasi sosial/Keagamaan dengan Pemerintah	kali	493	135,4
4.	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	kali	93,75	125

Tabel 3.2
Capaian Indikator Meningkatnya Pelayanan Terhadap Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah
Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100% (180 Kegiatan)	100% (180 Kegiatan)	100

Berdasarkan tingkat capaian indikator kinerja di disimpulkan bahwa pencapaian sasaran Peningkatan Pelayanan Terhadap Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah adalah sebesar 100% atau dikategorikan *Sangat Berhasil*. Dalam mencapai target dari pada indikator kinerja tersebut di atas, Biro Umum dituntut untuk melakukan pelayanan semaksimal mungkin terhadap Pimpinan yaitu Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Umum Tahun 2019-2023. Berbagai strategi kegiatan untuk meningkatkan pelayanan tersebut untuk mencapai target yang ditetapkan dalam Rentra SKPD yaitu :

1. Fasilitasi rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) 12 kali
2. Fasilitasi komunikasi Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Organisasi Sosial lainnya 48 kali
3. Fasilitasi tamu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 23 kali
4. Fasilitasi kunjungan kerja Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah 97 kali

Rincian strategi kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan meliputi; Memfasilitasi rapat-rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dengan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah sebanyak 12 kali dengan tingkat realisasi mencapai 100%, meliputi; Fasilitas Rapat Virtual Gubernur Bersama BPMD Provinsi NTT terkait Percepatan Pemanfaatan Dana Desa, Audiens Gubernur dengan Danlanal Rote Ndao, Rapat Evaluasi Wakil Gubernur mengenai PPKM Mikro, Audiens Wakil Gubernur dengan Hukum HAM Provinsi NTT, Fasilitas Rapat virtual Sekretaris Daerah dengan Kadis Kesehatan, Fasilitas rapat Sekretaris Daerah terkait percepatan vaksin dan penanganan jenazah covid 19 bersama Biro Hukum, Biro Pem dan Pol PP, Fasilitas rapat terkait percepatan penanganan pemakaman covid dipimpin oleh Sekretaris Daerah, dan lain sebagainya.



Rapat Gubernur NTT Bersama BPMD Prov. NTT terkait Percepatan Pemanfaatan Dana Desa



Audiens Gubernur NTT Bersama Danlanal Rote Ndao



Fasilitas rapat Sekretaris Daerah bersama Biro Hukum, Biro Pemerintahan dan Pol PP



Audiens Wakil Gubernur NTT mengenai PPKM Mikro



Rapat virtual Sekretaris Daerah dengan Dinas Kesehatan dan Pemerintah Kota Kupang



Audeins Wakil Gubernur NTT dengan Hukum dan Ham Provinsi NTT

Memfasilitasi audiens dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Organisasi Sosial Lainnya sebanyak 48 kali dengan tingkat realisasi mencapai 100%, meliputi; Audiens Gubernur NTT dengan Jemaat Gereja Horeb Tubtenu Kec. Amabi Oefeto Timur, Audiens Gubernur NTT dengan Rektor Undana Terpilih dan Tim, Audiens Gubernur NTT dengan Panitia Pesparani Jumat, 10 Des 2021, Audiens Gubernur NTT dengan Panitia Pembangunan PAUD Bethesda Kupang Tengah, Audiens Gub NTT Dengan Bpk. Ir. Esthon Foenay dan Pengurus Direktorat Akademi Teknik Kupang, Audiens Gubernur NTT dengan Tim Dokter Jantung dan Pembuluh Darah RS Harapan Kita, Audiens Gub NTT dengan Tanoto Foundation, Audiens Wakil Gubernur NTT dengan General Manager Pelindo NTT, Audiens Wakil Gubernur NTT dengan PMI Kota Kupang, Audiens Wakil Gubernur NTT dengan Pihak Gerek St. Yoseph Naikoten II, Audiens dari Pihak Lembaga Bantuan Hukum Tipikor NTT, dan lain sebagainya.



Audiens Gubernur NTT dengan Jemaat Gereja Horeb Tubtenu Kec. Amabi Oefeto Timur



Audiens Gubernur NTT dengan Rektor Undana Terpilih dan Tim



Audiens Wakil Gubernur NTT dengan General Manager Pelindo NTT



Audiens Wakil Gubernur NTT dengan PMI Kota Kupang

Memfasilitasi tamu Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Daerah lainnya sebanyak 23 kali dengan tingkat realisasi mencapai 100%, meliputi; Fasilitas Tamu Gubernur NTT bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI Johnny G. Plate mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan BTS di Provinsi NTT yang dilaksanakan di Hotel Aston Kupang, Fasilitas Tamu Gubernur NTT dengan Gubernur Kalimantan Utara di Resto Kelapa, Memfasilitasi kunjungan kerja Menteri Investasi oleh Wakil Gubernur di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Memfasilitasi kunjungan kerja Menteri Kominfo oleh Wakil Gubernur NTT, Memfasilitasi tamu Gubernur NTT dengan Ketua Bawaslu RI, Fasilitas Audiens Gubernur NTT bersama pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Fasilitas Gubernur NTT beraudiens dengan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Fasilitas audiens Wakil Gubernur NTT dengan Ketua Tim Badan Legislasi DPR RI, Fasilitas Wakil Gubernur NTT menjemput KSAL di VIP Pemda Bandara EL Tari, Fasilitas audiens Wakil Gubernur NTT dengan Sesditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, dan lain-lain.



Fasilitasi Tamu Gubernur NTT bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI Johnny G. Plate



Fasilitasi Tamu Gubernur NTT dengan Gubernur Kalimantan Utara



Memfasilitasi kunjungan kerja Menteri Investasi oleh Wakil Gubernur di Provinsi Nusa Tenggara Timur



Memfasilitasi kunjungan kerja Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah sebanyak 97 kali dengan tingkat realisasi mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan, meliputi; Fasilitas kunjungan kerja Gubernur NTT ke Daratan Flores Tanggal 20-26 Mei 2021, Fasilitas kunjungan kerja Gubernur NTT di Desa Sillu Kabupaten Kupang dalam rangka kegiatan panen dan tanam padi, Fasilitas Penandatanganan Peta batas antar kabupaten di Kemendagri RI oleh Wakil Gubernur NTT, Fasilitas kunjungan kerja Wakil Gubernur NTT meninjau pembangunan jembatan darurat Benananin 2 di Kabupaten Malaka, Fasilitas kunjungan kerja Wakil Gubernur NTT Mengunjungi Pos Lintas Batas Motamasin, Fasilitas Wakil Gubernur NTT menghadiri kegiatan di Kementerian Keuangan Jakarta terkait dengan Perjanjian Pinjaman Daerah dengan PT. SMI, Fasilitas kunjungan kerja Gubernur NTT ke Kabupaten Manggarai Barat mendampingi Menteri KOMINFO RI, Fasilitas kunjungan kerja Gubernur NTT ke Bali Mendampingi Menteri BAPPENAS RI, Fasilitas kunjungan kerja Gubernur NTT untuk melakukan tanam jagung TJPS di Kecamatan Kupang Timur desa Manusak, Fasilitas

kunjungan kerja Gubernur NTT ke Jakarta tanggal 8-11 september dengan rincian kegiatan sebagai berikut : Melakukan kunjungan ke Rumah Dinas Menteri Bappenas RI, Audiens dengan Pemuda NTT di Jakarta di Hotel Borobudur, beraudiens dengan Dirjen EBT di Hotel Borobudur, kunjungan ke Rumah Dinas Menteri ESDM, Fasilitas kunjungan kerja Gubernur NTT ke Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut : Peninjauan kegiatan vaksinasi di SMA Efata-Soe dan Peletakan batu pertama GMIT Nekamese Manikin, Fasilitas kunjungan kerja Wakil Gubernur NTT ke Jakarta dalam rangka; Pertemuan dengan Menko Perekonomian RI, Mengunjungi gerai yang menjual produk-produk lokal asli NTT pada Badan Penghubung di Jakarta, Pertemuan dengan Diaspora NTT di Jakarta.



Kunjungan kerja Gubernur NTT ke Daratan Flores



Kunjungan kerja Gubernur NTT di Desa Sillu Kabupaten Kupang



Penandatanganan Peta batas antar kabupaten di Kemendagri RI oleh Wakil Gubernur NTT



Wakil Gubernur meninjau pembangunan jembatan darurat Benananin 2 di Kabupaten Malaka

C. REALISASI ANGGARAN

Indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, didukung juga melalui aspek keuangan yang sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Rencana dan Realisasi Anggaran Biro Umum
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	Pendapatan	3.595.032.000	204.270.000	5,68
2	Belanja			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	111.617.829.255	102.309.636.358	91,66
	- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.686.220	14.246.000	80,54
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	47.720.009.318	44.633.921.690	93,53

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	12.546.676.195	11.050.835.817	88,07
	- Pengadaan Barang Milik Daerah	566.455.500	483.728.521	85,39
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	26.513.460.600	23.726.026.250	89,48
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah	6.305.638.000	5.053.485.566	80,14
	- Administrasi Keuangan dan Operasional KDH/ WKDH	3.216.330.662	3.190.260.488	99,18
	- Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	7.360.115.740	6.803.480.375	92,43
	- Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	7.371.457.000	7.353.651.651	99,75

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil evaluasi kinerja Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat disimpulkan bahwa sasaran indikator program yang telah ditetapkan dikategorikan sangat baik (100%). Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi Program Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan target yang telah ditetapkan 180 kegiatan dengan tingkat realisasi mencapai 100%.

Realisasi kinerja yang dikategorikan sangat berhasil, didukung dengan anggaran Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021, dengan tingkat realisasi pada belanja kegiatan meliputi; Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan tingkat realisasi mencapai 80,54%, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan tingkat realisasi mencapai 93,53%, Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan tingkat realisasi mencapai 88,07%, Pengadaan Barang Milik Daerah dengan tingkat realisasi mencapai 85,39%, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda dengan tingkat realisasi mencapai 89,48%, Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan tingkat realisasi mencapai 80,14, Administrasi Keuangan dan Operasional KDH/ WKDH dengan tingkat realisasi mencapai 99,18, Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan tingkat realisasi mencapai 92,43, Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan dengan tingkat realisasi mencapai 99,75%.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat kami rekomendasikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun berikutnya, yaitu :

1. Dalam rangka memperkuat fungsi pelayanan yang profesional terhadap seluruh kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah, maka diperlukan peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya aparatur dengan memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan dan pelatihan;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkup Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor, koordinasi dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan dengan melakukan inovasi-inovasi khususnya pada tingkat komunikasi dan teknologi.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang telah direncanakan. Laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabel seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang telah dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun Anggaran 2021.

22 Januari 2022
KEPALA BIRO UMUM,



GEORGE MELKIANUS HADJOH, SH
PEMBINA
NIP. 19650528 198603 1 014